



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON : (021) 3994230 (20 SALURAN) PSW 5200,5204, (021) 3450959, 3865130 FAKSIMILI : (021) 3846402
SITUS : www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 02 /PB/2019 8 Januari 2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengumuman Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara
Pada Satuan Kerja Pengelola APBN Periode I Tahun 2019

Yth. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian Negara/Lembaga
(Terlampir)

Sehubungan dengan pelaksanaan sertifikasi bendahara pada satuan kerja pengelola APBN periode I tahun 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Perpres ini mulai berlaku, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara.
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan pengumuman Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Periode I Tahun 2019. Pengumuman dimaksud dapat dilihat pada Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) dan/atau situs <http://www.djpb.kemenkeu.go.id>.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk:
 - a. Menginformasikan kepada satuan kerja lingkup masing-masing Kementerian Negara/Lembaga bahwa **pendaftaran sertifikasi bendahara dilakukan di UPS mulai tanggal 11 s.d. 31 Januari 2019.**
 - b. Meningkatkan partisipasi bendahara/calon bendahara pada satuan kerja lingkup masing-masing Kementerian Negara/Lembaga untuk mengikuti sertifikasi bendahara tersebut dalam rangka mendukung implementasi sertifikasi bendahara yang merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2016.
4. Informasi lebih lanjut terkait dengan pendaftaran sertifikasi bendahara dapat diperoleh dengan menghubungi Sekretariat Unit Penyelenggara Sertifikasi Bendahara melalui telepon: (021) 3846822 atau *e-mail*: sertifikasi.bendahara@kemenkeu.go.id atau UPS setempat.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Sistem Perbendaharaan,


Sudarso

Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Lampiran Surat
Nomor : S- 02 /PB/2019
Tanggal : 8 Januari 2019

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Badan Pemeriksa Keuangan
4. Mahkamah Agung
5. Kejaksaan Republik Indonesia
6. Kementerian Sekretariat Negara
7. Kementerian Dalam Negeri
8. Kementerian Luar Negeri
9. Kementerian Pertahanan
10. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
11. Kementerian Keuangan
12. Kementerian Pertanian
13. Kementerian Perindustrian
14. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
15. Kementerian Perhubungan
16. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
17. Kementerian Kesehatan
18. Kementerian Agama
19. Kementerian Ketenagakerjaan
20. Kementerian Sosial
21. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
22. Kementerian Kelautan Dan Perikanan
23. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
24. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
25. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
26. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
27. Kementerian Pariwisata
28. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
29. Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
30. Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
31. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
32. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
33. Badan Intelijen Negara
34. Lembaga Sandi Negara
35. Dewan Ketahanan Nasional
36. Badan Pusat Statistik
37. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
38. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN
39. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
40. Kementerian Komunikasi Dan Informatika
41. Kepolisian Negara Republik Indonesia
42. Badan Pengawas Obat Dan Makanan
43. Lembaga Ketahanan Nasional
44. Badan Koordinasi Penanaman Modal
45. Badan Narkotika Nasional
46. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
47. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
48. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
49. Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika
50. Komisi Pemilihan Umum

51. Mahkamah Konstitusi RI
52. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
53. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
54. Badan Tenaga Nuklir Nasional
55. Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
56. Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
57. Badan Informasi Geospasial
58. Badan Standardisasi Nasional
59. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
60. Lembaga Administrasi Negara
61. Arsip Nasional Republik Indonesia
62. Badan Kepegawaian Negara
63. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
64. Kementerian Perdagangan
65. Kementerian Pemuda Dan Olah Raga
66. Komisi Pemberantasan Korupsi
67. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
68. Komisi Yudisial RI
69. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
70. Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
71. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)
72. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73. Badan SAR Nasional
74. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76. Ombudsman Republik Indonesia
77. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
79. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80. Sekretariat Kabinet
81. Badan Pengawas Pemilihan Umum
82. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang
85. Badan Keamanan Laut
86. Kementerian Koordinator Bidang Kematriman
87. Badan Ekonomi Kreatif